



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KRITIK PBB TERHADAP KUHP BARU

Sita Hidriyah

Analisis Legislatif Ahli Muda
sita.hidriyah@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 6 Desember 2022 mendapat kritik dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui perwakilannya yang berkedudukan di Jakarta (Indonesia). Sehari setelah pengesahan, PBB sebagai organisasi dunia menyambut pemutakhiran kerangka hukum tersebut di Indonesia, tetapi menilai bagian-bagian dari KUHP baru tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan fundamental. Kekhawatiran PBB tersebut dirilis dalam laman resmi indonesian.un.org berjudul *Statement on the new Indonesian Criminal Code*.

Adapun bagian dari KUHP yang dinilai tidak sesuai adalah larangan berhubungan di luar nikah dan hidup bersama pasangan yang belum menikah. Kritik yang dikeluarkan PBB dikarenakan akan mendiskriminasi kepada perempuan, anak-anak, serta minoritas seksual. Lebih lanjut lagi, PBB menilai beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik serta melanggar kebebasan pers.

Selain itu, bagian dari ketentuan lain dari KUHP juga berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat disalahgunakan dalam melegitimasi sikap negatif sosial terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindak kekerasan. Seruan kemudian tertuju kepada otoritas eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa hukum di dalam negeri diselaraskan dengan kewajiban hukum HAM internasional guna mendorong pemerintah untuk tetap terlibat dalam dialog konsultatif terbuka dengan masyarakat sipil yang lebih luas dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa proses reformasi sejalan dengan komitmen global Indonesia. PBB menyatakan siap membantu Indonesia dalam upayanya untuk memperkuat kerangka legislatif dan kelembagaannya.

Menyikapi kritik PBB tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah memanggil perwakilan PBB di Jakarta. Juru Bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah mengungkapkan pemanggilan itu sudah dilakukan pada Senin, 12 Desember 2022. Terkait hal ini, Faizasyah menyinggung soal adab dalam hubungan diplomasi yang baik, yakni tidak menggunakan media massa untuk mengkritik suatu kebijakan negara lain. Faizasyah juga meminta PBB untuk tidak terburu-buru memberikan kritik sebelum mendapat informasi yang jelas soal KUHP.

Pernyataan keras muncul dari Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana terhadap kritik PBB tersebut, yang menyatakan bahwa KUHP baru adalah masalah yurisdiksi domestik yang harus dihormati oleh PBB dan tidak patut dikeluarkan oleh Perwakilan PBB di Indonesia. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Perwakilan PBB di Indonesia tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang menyatakan *"Tidak ada hal yang terkandung dalam Piagam ini yang memberikan kewenangan PBB untuk campur tangan dalam masalah yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestik suatu negara."*

Atensi DPR

Dengan KUHP yang telah disahkan menjadi bukti jika DPR RI menginginkan KUHP kali ini mampu mewujudkan cita-cita yang diharapkan serta dapat membawa manfaat bagi Indonesia. Apabila ada pihak yang tidak setuju dengan UU tersebut terbuka ruang bagi siapapun untuk menyampaikan pendapatnya melalui cara-cara damai dan saluran yang konstitusional. Khusus bagi perwakilan asing, termasuk PBB, hendaknya memerhatikan adab berdiplomasi dan tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan maupun pendapat sebelum mendapatkan informasi yang jelas soal KUHP.

Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai pasal-pasal dalam KUHP baru yang menjadi sorotan publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. DPR melalui fungsi pengawasan juga perlu mengingatkan pemerintah, khususnya Kemenlu RI, untuk mengingatkan perwakilan asing yang berada di Indonesia hendaknya tidak menggunakan media massa sebagai alat untuk mengkritik kebijakan yang terdapat di suatu negara.

Sumber

detik.news.com, 9 Desember 2022;
Kompas, 12 Desember 2022;
Republika, 13 Desember 2022;
republika.co.id, 14 Desember 2022;
tempo.co, 13 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.